

Bukti yang cukup sebagai syarat penahanan tersangka pada tahap penyidikan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP : studi kasus penahanan tersangka atas nama Taslim Suhada = Sufficient evidence as a validity condition of detention of suspects at this stage of investigation according to Point 21 point (1) Indonesian Criminal Procedural Law detention : case study on behalf Taslim Suhada

Rainer Faustine Jonathan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330680&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum sehari-hari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diatur lebih jelas mengenai upaya paksa, khususnya penahanan.

<hr>The regulations for conditions of validity of forceful measures in Indonesian legislation is not regulated clearly and well enough yet. The lack of regulations leads to legal uncertainty in the implementation of detention in law enforcement daily activities. The legal uncertainty has the potential to cause harm to society. Research methods used in this research is juridist normatives. The result of this research suggest that revision of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure and Police Chief Regulatory Number 14 of 2012 on Management of Criminal Investigation in order in both laws, shall be clear about the forceful measures, especially detention.